

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BIMA

*Gross Regional Domestic Product
of Bima Regency by Expenditure*

2014–2018

<https://b>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA**
Statistics of Bima Regency

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN

KABUPATEN BIMA

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure
of Bima Regency*

2014 – 2018

<https://bimakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA**

KATALOG DALAM PENERBITAN

Catalogue in Publication

Judul/ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut
Title Pengeluaran Kabupaten Bima 2014 – 2018/Gross Regional
Domestics Product (GRDP) by Expenditure of Bima Regency
2014 – 2018

ISBN :

No. Publikasi/ : 52060.1807
Publication Number

Ukuran Buku/ : 21 cm x 29 cm
Book Size

Jumlah Halaman/ : viii + 61
Total Pages

Naskah/ : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/
Manuscript Section of Regional Account Statistics and Statistics Analysis

Diterbitkan Oleh/ : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima/
Published By BPS – Statistics of Bima Regency

Dicetak Oleh/ : CV. MAHARANI
Printed By

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2014-2018

Gross Regional Domestic Product (GRDP) by Expenditure of Bima Regency
2014 – 2018

PENGARAH

Drs. Sapirin

PENANGGUNG JAWAB

Setiawan Kusmayudi, SE

PENULIS DAN PENGOLAH DATA

Roshan Fikri, S.ST

EDITOR

M. Ilhamuddin, S.ST

GAMBAR KULIT

Gede Ari Sudana, S.Si

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sector keuangan (*financial deepening*), peetpan pajak, kajian ekonomi ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan perhitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bima, September 2019
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA

Kepala,



Drs. Sapirin

NIP. 19661231 199401 1 002

DAFTAR ISI

Katalog Dalam Penerbitan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)....	2
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
 BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	 9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)...	10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5 Perubahan Inventori (PI)	19
2.6 Ekspor dan Impor	22
 BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BIMA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2014-2018.....	 23
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	24
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	32
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	32
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	36
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	37
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	41
3.2.5 Perkembangan Perubahan Inventori	42
3.2.6 Perkembangan Ekspor	43
3.2.7 Perkembangan Impor	44

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2014-2018	46
4.1	PDRB (Nominal)	47
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	48
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	50
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	51
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	52
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	52
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	53
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	55
	PENUTUP	57
	LAMPIRAN	59
	DAFTAR PUSAKA	60

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	25
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	26
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	28
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	30
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	31
Tabel 6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	33
Tabel 7	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	34
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	35
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	36
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	36
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	38
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	41
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	42
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	43
Tabel 15	Perkembangan Impor Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	45
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	47
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2014-2018	48
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	49

Tabel 19	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	47
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (Atas Dasar harga Berlaku) Tahun 2014-2018	48
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	49
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	50
Tabel 23	Neraca Perdagangan Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	52
Tabel 24	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Bima Tahun 2014-2018	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2014-2018.....	25
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2014-2018.....	27
Grafik 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,Kabupaten Bima 2014-2018.....	27
Grafik 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2014-2018.....	29
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2014-2018.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017 (Miliar Rupiah)	60
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017 (Miliar Rupiah)	61
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017 (persen)	62
Lampiran 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017 (persen)	63
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017 (persen)	64
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017 (persen)	65
Lampiran 7	Indeks harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2013-2017	67
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (persen), Kabupaten Bima 2014-2018	68



I *BAB I* *PENDAHULUAN*

<https://bimakab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRBPengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **“output akhir (final output)”**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesiansbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRBProduksi akan “identik” dengan PDRBPengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasikan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomiterkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahantahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkannilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan(dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluanmodelingdan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

-) Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
-) Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh padapola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
-) Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
-) Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi,sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
-) Tersedianya data dasaruntuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
-) Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

J Konsep dan Cakupan

- a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contohnya nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

J Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

J Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

J Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



II *BAB II*

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bimakab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

-] Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
-] Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
-] Sensus Penduduk 2010, BPS
-] Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
-] Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan *men-deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
---------------	----------	------------

Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasidalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akantercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalambentukbangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan;tumbuhan danternak;serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur

penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak

langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$P_A = \frac{P}{I} \cdot A$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi: PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjen Kementan.

V Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori(PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = $\text{Volumen inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$

PI atas dasar harga Konstan = $\text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$

PI atas dasar harga Berlaku = $\text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antarresiden wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Import dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan import didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan import dengan menggunakan metoda tidak langsung.

III BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BIMA
MENURUT PDRB PENGELUARAN
2014-2018

<https://bimakab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2015 meningkat sebesar 0,11%, yakni dari 8.286,05 miliar Rupiah (2000=100) menjadi 9.196,01 miliar Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih kecil, yakni dari 6.783,72 miliar Rupiah (2000=100) menjadi 7.130,20 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 0,05%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Bima periode 2014-2017 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 6,01 %; 6,36 %; 5,30 %; dan 6,30 % sedangkan di Tahun 2018 perekonomian Kabupaten Bima tumbuh sebesar 4,00 %. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yakni sebesar 5,59 %. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima didominasi pertumbuhan komponen Perubahan Inventori, yang menyumbang sebesar 25,87 % dari total PDRB.

Pada periode tahun 2014–2018 PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 7.310,49 miliar Rupiah (2014); 8.286,05 miliar Rupiah (2015); 9.130,54 miliar Rupiah (2016); 10.037,57 miliar Rupiah (2017); dan 10.818,78 miliar Rupiah (2018). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bima pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

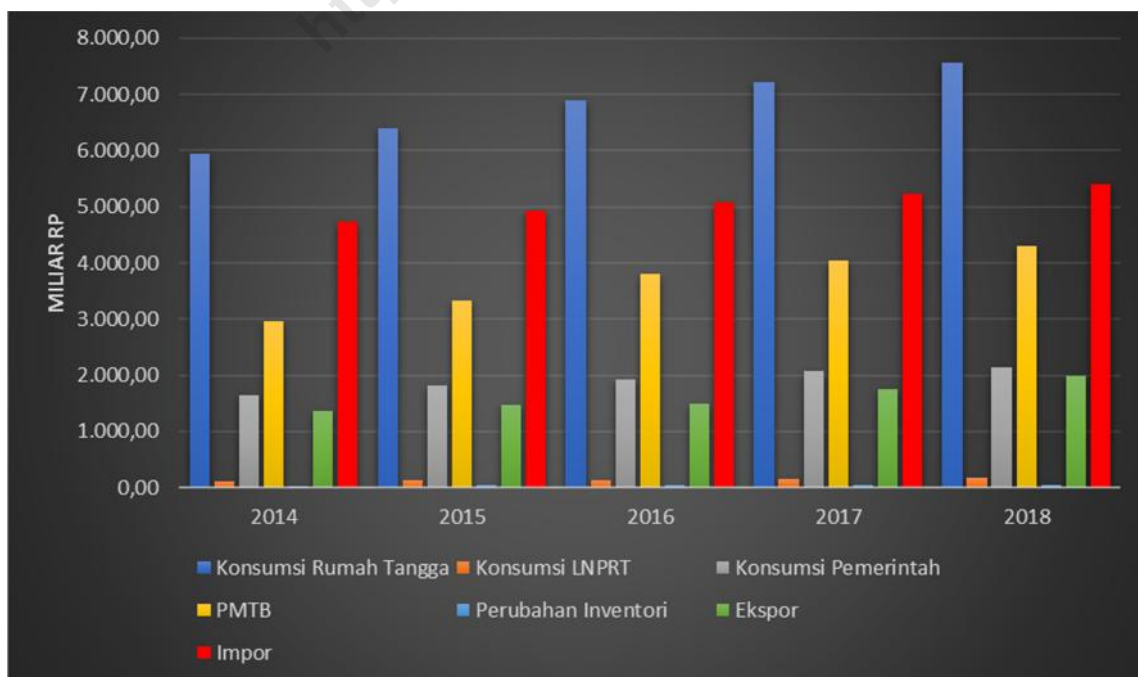
**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2014 - 2018**
*Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Region Bima.
2014-2018*

(Miliar Rp/ Trillion Rp)					
Komponen Pengeluaran/ Expenditure item	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption	5.949,09	6.406,08	6.890,98	7.215,98	7.575,38
2. Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption	116,15	128,57	138,89	152,53	169,10
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	1.634,84	1.823,92	1.927,40	2.066,92	2.135,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2.955,85	3.339,56	3.798,17	4.033,80	4.303,20
5. Perubahan Inventori/ Changes of Inventory	25,92	36,65	36,48	37,70	48,44
6. Ekspor/ Export	1.367,83	1.477,03	1.493,00	1.753,45	1.984,60
7. Impor/ Import	4.739,18	4.925,75	5.072,91	5.222,82	5.397,75
PDRB / GRDP	7.310,49	8.286,05	9.130,54	10.037,57	10.818,78

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2014 - 2018**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bima pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

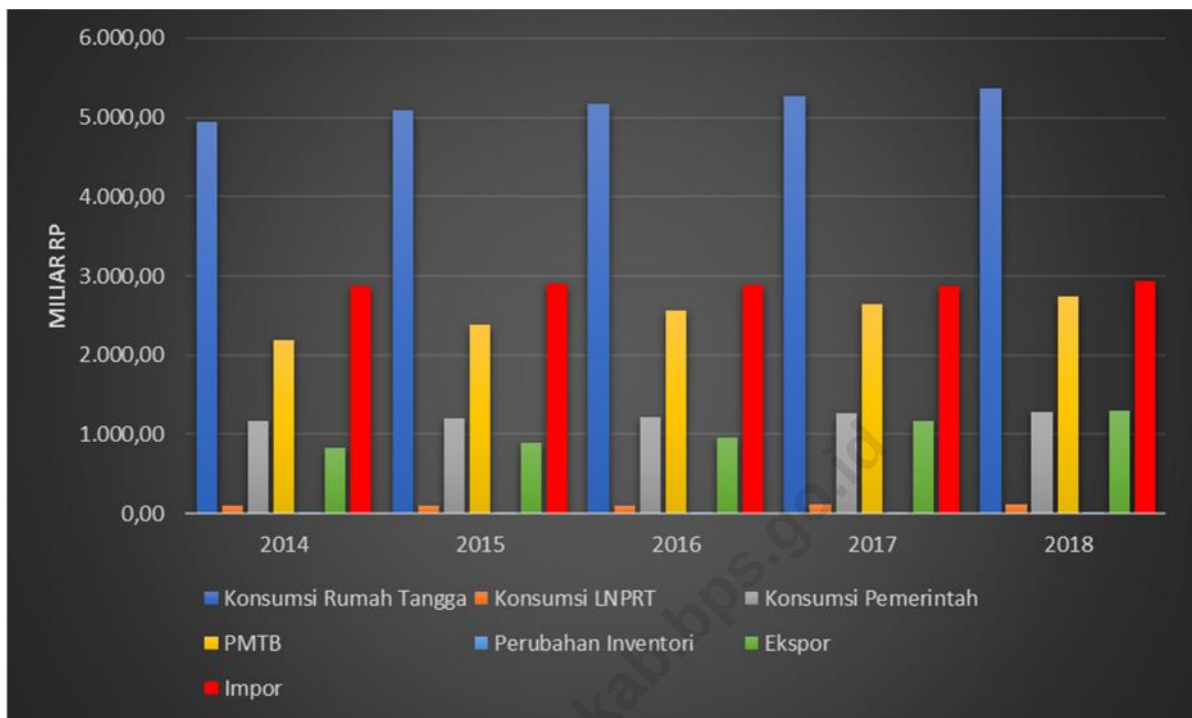
**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2014 - 2018**
*Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Bima
2014-2018*

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Miliar Rp/ <i>Trillion Rp</i>)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	4.939,11	5.090,37	5.173,69	5.270,73	5.368,78
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	95,00	100,91	105,09	111,21	119,04
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.174,21	1.201,50	1.213,67	1.262,70	1.277,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.190,47	2.385,28	2.558,38	2.644,79	2.747,42

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

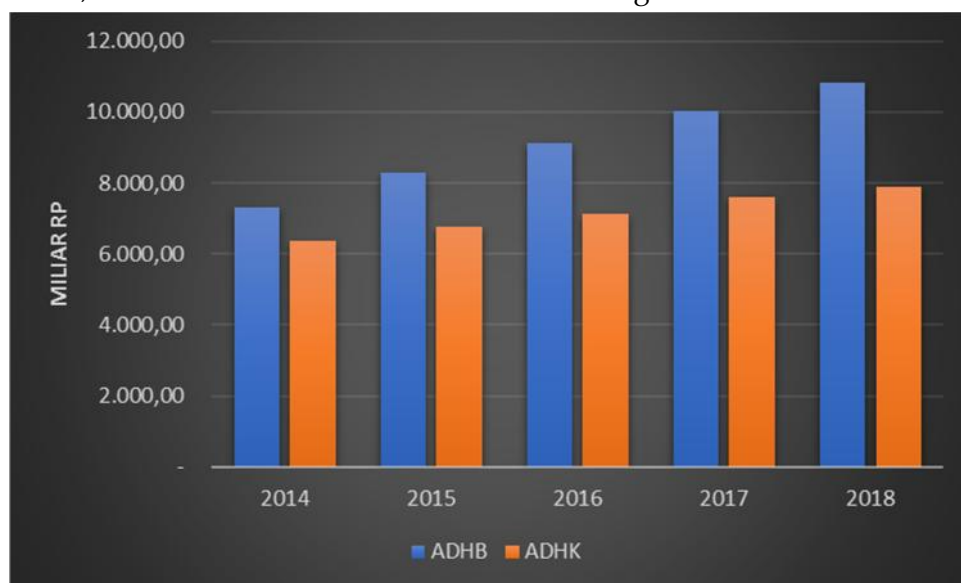
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bima meningkat, yakni sebesar 6.377,80 miliar Rupiah (2014); 6.783,72 miliar Rupiah (2015); 7.143,34 miliar Rupiah (2016); 7.593,36 miliar Rupiah (2017); dan 7.897,20 miliar Rupiah (2018).

**Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2014 - 2018**



**Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2014-2018**

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB



atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang

cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bima 2014 - 2018**
*Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Region Bima.
2014-2018*

(%)					
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	81,38	77,31	74,58	71,89	70,02
1. Konsumsi LNPRT	1,59	1,55	1,52	1,52	1,56
2. Konsumsi Pemerintah	22,36	22,01	21,11	20,59	19,74
3. PMTB	40,43	39,95	41,60	40,19	39,78
4. Perubahan Inventori	0,35	0,44	0,40	0,38	0,45
5. Ekspor	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
6. Impor	3,20	4,22	4,02	3,86	3,97
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

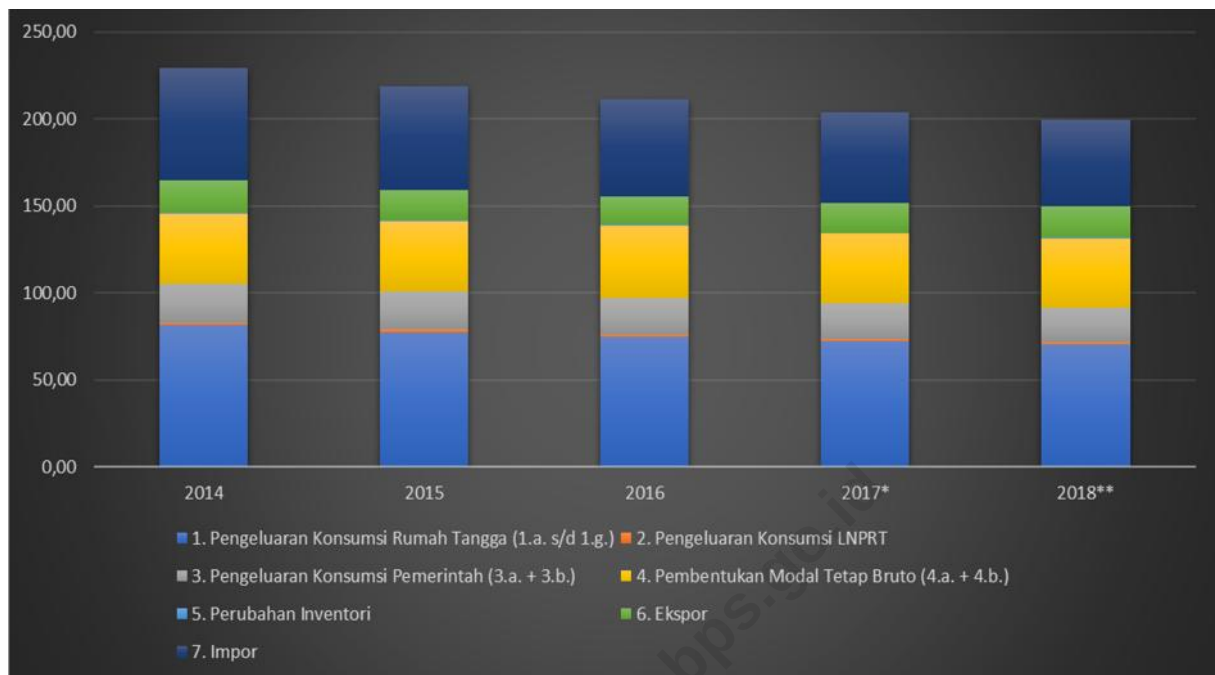
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, PDRB Kabupaten Bima, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT), dimana pada tahun 2018 sebesar 70,02 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar yakni sekitar 39,78 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sebesar 18,34 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sebesar 49,89 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bima 2014- 2018**



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 18,62 – 20,73 persen seperti yang terlihat pada grafik 4. diatas yang berwarna hijau. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2014-2018 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima mengalami peningkatan, yakni sebesar 6,01persen (2014); 6,36 persen (2015); 5,30 persen (2016); 6,30 persen (2017); dan 4,00 persen (2018). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bima, 2014 - 2018**
*Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure,
Region Bima, 2014-2018*

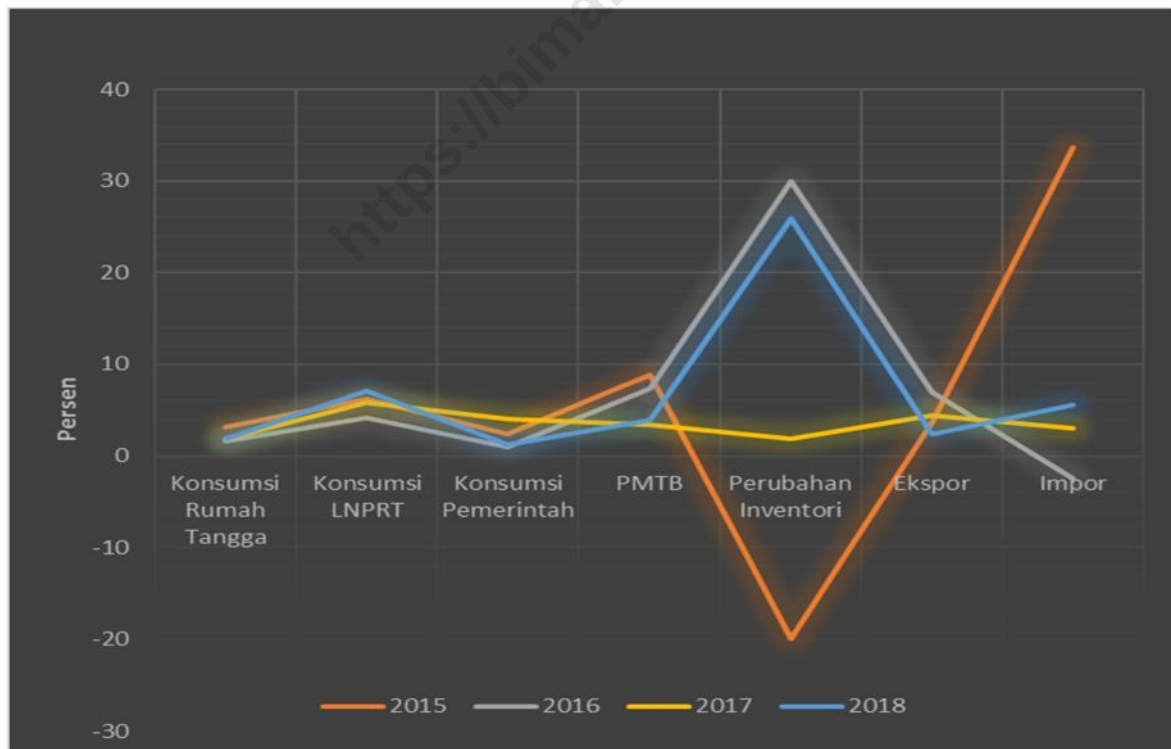
(%)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,06	3,06	1,64	1,88	1,86
2. Konsumsi LNPR	11,87	6,22	4,15	5,82	7,04
3. Konsumsi Pemerintah	9,33	2,32	1,01	4,04	1,21
4. PMTB	4,02	8,89	7,26	3,38	3,88
5. Perubahan Inventori	323,27	(19,94)	30,02	1,81	25,87
6. Ekspor	(22,17)	7,96	7,06	21,76	11,56
7. Impor	(6,38)	1,23	(0,67)	(0,12)	2,06
Total PDRB	6,01	6,36	5,30	6,30	4,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2014 – 2018



Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014–2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bima 2014 - 2018**

*Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure,
Region Bima 2014 - 2018*

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	120,45	125,85	131,62	136,91	141,10
2. Konsumsi LNPRT	122,26	127,41	132,16	137,16	142,06
3. Konsumsi Pemerintah	139,22	151,80	158,81	163,69	167,13
4. PMTB	134,94	140,01	148,46	152,52	156,63
5. Perubahan Inventori	142,54	251,80	192,76	195,67	199,71
6. Ekspor	127,84	131,89	134,11	139,65	146,59
7. Impor	131,27	146,71	158,02	161,92	170,11
Total PDRB	114,62	122,15	127,82	132,19	137,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Disisi Lain, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik itu konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan konsumsi pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Dari Tabel 5 akan terlihat ingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014-2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen hingga mencapai nilai indeks implisit tertinggi pada tahun 2018 sebesar 137,00 persen .

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Bima untuk periode 2014 – 2018.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bima ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bima maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 – 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bima

**Table 6. Trend of Using on Final Household Consumption of Region
Bima 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	5.949,09	6.406,10	6.809,50	7.215,98	7.575,38
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.939,11	5.090,40	5.173,69	5.270,72	5.368,78
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	81,38	77,31	74,58	71,89	70,02
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	47.371,94	51.153,93	54.612,03	58.099,93	60.963,30
b. ADHK 2010	41.304,85	42.469,43	43.395,68	43.604,88	43.951,07
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	11.885,86	12.837,41	13.668,33	14.541,35	15.263,77
b. ADHK 2010	10.365,63	10.657,98	10.861,10	10.913,50	11.004,31
Pertumbuhan ⁶ (persen)					
a. Total Konsumsi RT	4,17	4,06	3,06	1,60	1,91
b. Per-RT	2,89	2,82	2,24	0,40	0,78
c. Perkapita	2,89	2,82	1,96	0,40	0,83
Jumlah RT (unit)	114.910	116.298	117.302	118.606	119.922
Jumlah penduduk (org)	457.892	463.419	468.682	473.890	478.967

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2014 – 2018 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 81,38 persen (2014); 77,31 persen (2015); 74,58 persen (2016); 71,89 persen (2017); dan 70,02 persen (2018). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 81,38 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 70,02 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2016 terjadi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga Bahan Pokok.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumahtangga di Kabupaten Bima menghabiskan dana sekitar 47.371,96 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 51.153,93 ribu Rupiah (2014); 54.612,03 ribu Rupiah (2015); 58.099,93 ribu Rupiah (2016); dan 60.963,30 ribu Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran diatas 1,60 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,89 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” pada kisaran 0,40 s.d 2,89 persen. Hal tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bima

Table 7. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Region Bima 2014–2018

Kelompok Konsumsi	(%)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	38,83	38,39	38,68	38,63	38,70
Pakaian dan Alas Kaki	2,28	2,23	2,27	2,23	2,24
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	18,80	19,61	19,72	19,89	19,90
Kesehatan & Pendidikan	7,58	7,52	7,75	7,93	8,05
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,76	17,39	16,39	16,00	15,90
Hotel & Restoran	4,86	4,92	5,10	5,26	5,14
Lainnya	9,88	9,94	10,08	10,05	10,07
tal Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, terlihat pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Bima, bahwa konsumsi bukan makanan selalu lebih tinggi dibandingkan konsumsi untuk makanan. Proporsi konsumsi makanan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar pada angka 38 persen, tidak banyak mengalami perubahan.

Pola proporsi konsumsi diatas tidak menunjukkan pergeseran yang cukup berarti dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan ataupun sebaliknya. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi dalam masyarakat.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima, Tahun 2014 – 2018
Table 8. Real Growth of Household Final Consumption Expenditure, Region Bima 2014 – 2018

	(%)				
Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,82	2,32	1,34	1,26	1,05
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,88	1,31	2,59	0,55	1,86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,81	4,53	1,03	0,82	1,92
d. Kesehatan & Pendidikan	4,44	1,77	2,68	3,66	2,85
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,87	4,64	1,98	2,59	3,03
f. Hotel & Restoran	5,45	3,96	4,39	6,16	1,59
g. Lainnya	0,12	1,29	0,98	1,86	2,14
Total Konsumsi	4,06	3,06	1,64	1,88	1,86

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan riil, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,82 persen (2014); 2,32 persen (2015); 1,34 persen (2016), 1,26 persen (2017), dan 1,05 persen (2018). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2018 tertinggi terjadi pada kelompok konsumsi Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya, yaitu sebesar 3,03 persen. Sedangkan pertumbuhan konsumsi terendah, yaitu pada kelompok konsumsi Makanan, Minuman dan Rokok, sebesar 1,05 persen. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima

Table 9. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Region Bima 2014–2018

(%)

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,02	4,03	5,71	4,51	4,07
b. Pakaian dan Alas Kaki					
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,05	3,84	5,32	3,81	3,23
d. Kesehatan & Pendidikan	5,77	7,44	5,79	6,00	3,06
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,73	4,96	6,74	4,54	3,63
f. Hotel & Restoran	5,75	0,75	(1,75)	0,83	1,24
g. Lainnya	3,97	4,92	5,56	2,88	1,07
Total Konsumsi	5,02	4,48	4,59	4,02	3,06

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bima
Table 10. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Region Bima
 2014– 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	116,15	128,57	138,89	152,53	169,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	95,00	100,91	105,09	111,21	119,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,46	1,59	1,55	1,51	1,51
Laju pertumbuhan (%)	11,87	6,22	4,15	5,82	7,04

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 konsumsi LNPRT sebesar 116,15 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 128,57 miliar rupiah (2015), 138,89 miliar rupiah (2016), 152,53 miliar rupiah (2017) dan 169,10 miliar rupiah (2018). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami fluktuatif yaitu sebesar 11,87 persen (2014), 6,22 persen (2015), 4,15 persen (2016), 5,82 persen (2017), dan 7,04 persen (2018). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 disebabkan Karena adanya banyak kegiatan yang dilakukan oleh LNPRT seperti Pilpres dan Pilkada diseluruh daerah.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bima
Table 11. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Region Bima 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.634,84	1.823,92	1.927,40	2.066,92	2.135,81
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.174,31	1.201,50	1.213,67	1.262,70	1.277,97
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	22,36	22,01	21,11	20,59	19,74
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3.527,77	3.891,60	4.067,20	4.315,37	4.413,74
b. ADHK 2010	2.534,01	2.563,57	2.561,08	2.636,30	2.640,97
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	183.216	188.247	222.950	251.511	259.859
b. ADHK 2010	131.605	124.006	140.390	153.650	155.508
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi pemerintah	9,33	2,32	1,01	4,04	1,21
b. Konsumsi perkapita	8,02	1,17	(0,10)	2,94	0,18
c. Konsumsi per-pegawai	8,25	(5,77)	13,21	9,45	1,21
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁸	8.923	9.689	8.645	8.218	8.218
Jumlah penduduk (000 org)	463.419	468.682	473.890	478.967	483.901

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁸ Tidak termasuk polisi dan militer

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 9,33 persen. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami perlambatan pertumbuhan, dari 22,36 persen (tahun 2014) hingga mencapai 19,74 persen (tahun 2018). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 19,74 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 22,36 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010.

Konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah menunjukkan peningkatan. Berkurangnya jumlah pegawai pemerintah pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2018 dan meningkatnya jumlah konsumsi pemerintah dari tahun ke tahun menjadi salah satu alasan. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016, sebesar 13,21 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 - 2018 berfluktuasi dimana pertumbuhan PMTB

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 8,89 persen dan terendah pada tahun 2017, sebesar 3,38 persen.

PMTB memiliki peranan penting dalam penyusunan PDRB dimana PMTB memiliki kontribusi dalam kurun waktu 2014 – 2018 yang berfluktuasi dari 40,43 persen pada tahun (2014) dan 39,78 persen pada tahun (2018), sementara ditahun yang lainnya masing- masing 40,30 persen (2015), 41,60 persen (2016), dan 40,19 persen (2017).

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bima
Table12. Trend and Structure of GFCF, Region Bima
2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.955,85	3.339,56	3.798,17	4.033,80	4.303,20
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.190,47	2.385,28	2.558,38	2.644,79	2.747,42
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	40,43	40,30	41,60	40,19	39,78
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (Miliar Rp)	1.413,13	1.581,08	1.874,66	2.036,55	2.153,82
(%)	19,33	19,08	20,53	20,29	19,91
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1.542,72	1.758,47	1.923,51	1.997,25	2.149,38
(%)	21,10	21,22	21,07	19,90	19,87
Total PMTB (Miliar Rp)	2.955,85	3.339,56	3.798,17	4.033,80	4.303,20
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	4,36	8,48	12,46	6,01	2,74
b. Non Bangunan	3,73	9,27	2,58	0,78	5,07
Pertumbuhan Total PMTB	4,02	8,89	7,26	3,38	3,88

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Bima**
*Table 13. Trend and Structure of Changes in Inventories, Region Bima
2014 – 2018*

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB(Miliar Rp)	25,92	36,65	36,48	37,70	48,44
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	18,18	14,56	18,93	19,27	24,25
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,35	0,44	0,40	0,38	0,45

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2014 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 25,92 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 36,65 miliar rupiah dan tahun 2016 perubahan inventori menurun mencapai 36,48 miliar rupiah dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2017 sebesar 37,70 miliar rupiah dan tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 48,44 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Bima secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, proporsi perubahan inventori adalah 0,35 persen, selanjutnya 0,44 persen (2015), 0,40 persen (2016) dan mengalami penurunan 0,38 persen (2017). Pada tahun 2018 proporsi perubahan inventori terhadap PDRB di Kabupaten Bima meningkat menjadi 0,45 persen. Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh banyak persediaan barang yang masuk ke kabupaten Bima.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Bima, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor
Kabupaten Bima**
Table 14. Trend of Export, Region Bima
2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.367,83	1.477,02	1.493,01	1.753,45	1.984,60
b. ADHK (Miliar Rp)	826	891	954	1.162	1.296
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	18,71	17,83	16,35	17,47	18,34
Pertumbuhan ¹² (%)	(22,17)	7,96	7,06	21,76	11,56

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara kuantitas, dalam kurun waktu 2014-2018, nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1.367,83 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 1.477,02 miliar rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1.493,01 miliar rupiah; 1.753,45 miliar rupiah; dan 1.984,60 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 826 miliar rupiah (2014); 891 miliar rupiah (2015); 954 miliar rupiah (2016); 1.162 miliar rupiah (2017); dan 1.296 miliar rupiah (2018). Sementara itu, pada periode 2014 sampai dengan 2018, proporsi dalam PDRB justru cenderung fluktuatif dari 18,71 persen pada tahun 2014 menjadi 18,34 persen di tahun 2018.

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 21,76 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya barang yang di ekspor sangat banyak. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar (22,17) persen (2014); 7,96 persen (2015); 7,06 persen (2016); dan 11,56 persen (2018).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Bima. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (direct purchase) oleh penduduk (resident) Kabupaten Bima di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Bima terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total, nilai impor barang dan jasa Kabupaten Bima meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 4.793,18 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 4.925,75 miliar rupiah, 5.072,91 miliar rupiah pada tahun (2016), 5.222,82 miliar rupiah pada tahun (2017), dan menjadi 5.397,75 miliar rupiah pada tahun 2018.

Proporsi nilai Impor terhadap PDRB Kabupaten Bima lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Secara keseluruhan, proporsi nilai impor terhadap PDRB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 masih diatas 50 persen. Tahun 2018 proporsi nilai impor tercatat paling rendah, yaitu sebesar 49,89 persen. Dari sisi pertumbuhan, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2,06 persen.

**Tabel 15. Perkembangan Impor
Kabupaten Bima**
Table 15. Trend of Import, Region Bima 2014 – 2018

Uraian (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017* (5)	2018** (6)
Total Nilai Impor					
a.ADHB (Miliar Rp)	4.793,18	4.925,75	5.072,91	5.222,82	5.397,75
b.ADHK (Miliar Rp)	2.865,00	2.900,35	2.880,83	2.877,39	2.936,63
(% - ADHB)	64,83	59,45	55,56	52,03	49,89
Pertumbuhan ¹³ (%)	(6,38)	1,23	(0,67)	(0,12)	2,06

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

¹³Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

IV BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN KABUPATEN BIMA
2014 - 2018

<https://bimakab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bima, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Bima, Tahun 2014 – 2018**

Table 16. GRD and GRD perkapita, Region Bima 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	7.310,49	8.286,05	9.130,54	10.037,57	10.818,78
- ADHK 2010	6.377,80	6.783,72	7.143,34	7.593,36	7.897,20
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	15.775,12	17.679,48	19.267,21	20.956,70	22.357,43
- ADHK 2010	13.762,49	14.474,04	15.073,84	15.853,63	16.319,87
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,75	5,17	4,14	5,17	2,94
Jumlah penduduk (org)	463.419	468.682	473.890	478.967	483.901
Pertumbuhan penduduk	1,21	1,13	1,11	1,07	1,03

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Bima pada periode 2014 s.d 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 13.762,49 ribu rupiah pada tahun 2014 menjadi 16.319,87 ribu rupiah pada tahun 2018. Disisi lain jumlah pertumbuhan penduduk terus mengalami perlambatan pada periode yang sama dengan kisaran 1,21 s.d 1,03 persen per tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bima rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima
Table 19. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP, Region Bima 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	5.949,09	6.406,08	6.809,50	7.215,98	7.575,38
b. LNPRT	116,15	128,56	138,89	152,53	169,10
c. Pemerintah	1.634,83	1.823,92			
J u m l a h PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	6.006,57	6.492,35	7.310,49	8.299,69	9.171,39
Proporsi	1,04	1,04	1,05	1,00	0.87

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Seluruh barang dan jasa yang berada di wilayah Bima digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir bahkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir sehingga harus mengimpor dari luar daerah dan luar negeri. Meskipun konsumsi akhir meningkat pada tahun 2018, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

4.3 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri dan regional. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (Atas Dasar Harga Berlaku)
Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.367,83	1.477,02	1.493,01	1.753,45	1.984,60
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	2.953,85	3.339,56	3.798,17	4.033,79	4.303,20
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,46	0,44	0,39	0,43	0,46

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 ekspor selalu mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.4 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Bima Tahun 2013 – 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	7.310,49	8.286,05	9.130,54	10.037,57	10.818,78
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	4.739,18	4.925,75	5.072,91	5.222,82	5.397,75
Rasio PDRB terhadap Impor	1,54	1,68	1,80	1,92	2,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2014–2018 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2018 (2,00). Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.5 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penediaan dan Permintaan Kabupaten Bima, Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penediaan					
PDRB (ADHB)	7.310,49	8.286,05	9.130,54	10.037,57	10.818,78
(Miliar Rp)					
%	60,67	62,72	64,28	65,78	66,71
Total nilai Impor					
ADHB	4.739,18	4.925,75	5.072,91	5.222,82	5.397,75
(Miliar Rp)					
%	39,33	37,28	35,72	34,22	33,29
Total Permintaan					
Akhir ¹⁴ (Miliar Rp)	12.049,67	13.211,80	14.203,45	15.260,38	16.216,53
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk atau sekitar 33,29 s.d 39,33 persen masih harus didatangkan dari luar negeri. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 60 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 12.049,67 miliar (2014) menjadi sebesar 16.216,53 miliar rupiah (2018).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 7.310,49 miliar rupiah (2014); 8.286,05 miliar rupiah (2015); 9.130,54 miliar rupiah (2016); 10.037,57 miliar rupiah (2017); dan 10.818,78 miliar rupiah (2018). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 4.739,18 miliar rupiah (2014); 4.925,75 miliar rupiah (2015); 5.072,91 miliar rupiah (2016); 5.222,82 miliar rupiah (2017); dan 5.397,75 miliar rupiah (2018).

4.6 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar,

apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 23. Neraca Perdagangan Kabupaten Bima, Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.367,83	1.477,02	1.493,01	1.753,45	1.984,60
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	4.739,18	4.925,75	5.072,91	5.222,82	5.397,75
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	(3.371,34)	(3.448,72)	(3.579,90)	(3.469,37)	(3.413,15)
Rasio ekspor thdp Impor (%)	0,29	0,30	0,29	0,34	0,37

*) Angka Sementara

**) Angka Saneat Sementara

Selama periode 2014 - 2018, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bima dengan luar negeri dan antar daerah, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bima selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Kabupaten Bima yang terjadi antara tahun 2014 sampai dengan 2018 tercatat masing-masing sebesar 3.371,34 miliar rupiah (2014), 3.448,72 miliar rupiah (2015), 3.579,90 miliar rupiah (2016), 3.469,37 miliar rupiah (2017), dan 3.413,15 miliar rupiah (2018).

Sementara rasio ekspor terhadap impor dari tahun 2014-2018 selalu dibawah 1 artinya nilai ekspor selalu lebih kecil dibandingkan nilai impor. Pada tahun 2014 rasionya sebesar 0,29 menjadi sekitar 0,30 pada tahun 2015, kemudian 0,29 pada tahun 2016; 0,34 pada tahun 2017; dan 0,37 pada tahun 2018.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Bima,
Tahun 2014 - 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	6.377,80	6.783,72	7.143,34	7.593,36	7.897,20
Perubahan (miliar Rp)	361,67	405,92	359,62	450,02	303,84
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	2.190,47	2.385,28	2.558,38	2.644,79	2.747,42
ICOR	6,06	5,88	7,11	5,88	9,04

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2014 sebesar 6,06. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 5,88. Tahun 2016 ICOR mengalami peningkatan menjadi 7,11 dan kembali turun menjadi 5,88 pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, besaran ICOR mencapai nilai tertinggi selama periode tahun diatas, sebesar 9,04. Untuk meningkatkan output atau nilai tambah sebesar 1 milyar rupiah, pemerintah perlu menginvestasikan modal sebesar 9,04 milyar rupiah.

<https://bimakab.bps.go.id>

V *BAB V*

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bima pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d 2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing- masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (external account) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bima terhadap ekonomi luar daerah.

VI *LAMPIRAN*

<https://bimakab.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 (Juta Rupiah), Kabupaten Bima Tahun 2014 - 2018**

Versi Tahun Dasar 2010

Kategori					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5.949.089	6.406.079	6.809.498	7.215.985	7.575.381
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.310.084	2.459.010	2.634.193	2.787.684	2.931.517
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	135.908	142.978	154.490	161.252	169.544
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.118.547	1.256.224	1.342.752	1.435.012	1.507.288
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	451.070	481.795	528.035	572.245	609.951
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.056.720	1.114.055	1.116.295	1.154.694	1.204.422
1.f. Hotel dan Restoran	289.158	315.383	347.534	379.574	389.709
1.g. Lainnya	587.601	636.635	686.200	725.524	762.949
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	116.147	128.565	138.892	152.531	169.101
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	1.634.835	1.823.924	1.927.403	2.066.918	2.135.814
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2.955.846	3.339.557	3.798.169	4.033.799	4.303.200
4.a. Bangunan	1.413.131	1.581.083	1.874.657	2.036.546	2.153.822
4.b. Non-Bangunan	1.542.715	1.758.474	1.923.512	1.997.253	2.149.378
5. Perubahan Inventori	25.918	36.654	36.483	37.704	48.437
6. Ekspor	1.367.834	1.477.025	1.493.009	1.753.449	1.984.599
7. Impor	4.739.178	4.925.749	5.072.914	5.222.817	5.397.751
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	7.310.492	8.286.054	9.130.540	10.037.569	10.818.782

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010 (Juta Rupiah), Kabupaten Bima Tahun 2014 - 2018**

Versi Tahun Dasar 2010

Kategori					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4.939.111	5.090.370	5.173.688	5.270.727	5.368.778
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.930.958	1.975.788	2.002.210	2.027.357	2.048.584
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	117.998	119.544	122.645	123.315	125.605
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	931.979	974.181	984.260	992.313	1.011.334
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	375.787	382.434	392.668	407.045	418.665
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	876.116	916.804	934.973	959.195	988.255
1.f. Hotel dan Restoran	232.800	242.016	252.630	268.192	272.448
1.g. Lainnya	473.473	479.603	484.303	493.311	503.887
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	94.997	100.908	105.093	111.209	119.038
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	1.174.309	1.201.499	1.213.670	1.262.700	1.277.968
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2.190.470	2.385.282	2.558.379	2.644.790	2.747.419
4.a. Bangunan	1.041.136	1.129.434	1.270.113	1.346.476	1.383.320
4.b. Non-Bangunan	1.149.334	1.255.847	1.288.266	1.298.314	1.364.099
5. Perubahan Inventori	18.183	14.557	18.927	19.269	24.254
6. Ekspor	825.727	891.459	954.417	1.162.056	1.296.371
7. Impor	2.864.996	2.900.352	2.880.833	2.877.387	2.936.626
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	6.377.801	6.783.723	7.143.341	7.593.364	7.897.201

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima**

Versi Tahun Dasar 2010

Persen

Kategori					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	81,38	77,31	74,58	71,89	70,02
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,60	29,68	28,85	27,77	27,10
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,86	1,73	1,69	1,61	1,57
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15,30	15,16	14,71	14,30	13,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,17	5,81	5,78	5,70	5,64
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,45	13,44	12,23	11,50	11,13
1.f. Hotel dan Restoran	3,96	3,81	3,81	3,78	3,60
1.g. Lainnya	8,04	7,68	7,52	7,23	7,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,59	1,55	1,52	1,52	1,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	22,36	22,01	21,11	20,59	19,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	40,43	40,30	41,60	40,19	39,78
4.a. Bangunan	19,33	19,08	20,53	20,29	19,91
4.b. Non-Bangunan	21,10	21,22	21,07	19,90	19,87
5. Perubahan Inventori	0,35	0,44	0,40	0,38	0,45
6. Ekspor	18,71	17,83	16,35	17,47	18,34
7. Impor	64,83	59,45	55,56	52,03	49,89
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran, Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Versi Tahun Dasar 2010

Persen

Kategori					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,06	3,06	1,64	1,88	1,86
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,82	2,32	1,34	1,26	1,05
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,88	1,31	2,59	0,55	1,86
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,81	4,53	1,03	0,82	1,92
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,44	1,77	2,68	3,66	2,85
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,87	4,64	1,98	2,59	3,03
1.f. Hotel dan Restoran	5,45	3,96	4,39	6,16	1,59
1.g. Lainnya	0,12	1,29	0,98	1,86	2,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,87	6,22	4,15	5,82	7,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	9,33	2,32	1,01	4,04	1,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,02	8,89	7,26	3,38	3,88
4.a. Bangunan	4,36	8,48	12,46	6,01	2,74
4.b. Non-Bangunan	3,73	9,27	2,58	0,78	5,07
5. Perubahan Inventori	323,27	(19,94)	30,02	1,81	25,87
6. Ekspor	(22,17)	7,96	7,06	21,76	11,56
7. Impor	(6,38)	1,23	(0,67)	(0,12)	2,06
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	6,01	6,36	5,30	6,30	4,00

**) Angka Sementara*

***) Angka Sangat Sementara*

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima

Versi Tahun Dasar 2010

Kategori					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	120,45	125,85	131,62	136,91	141,10
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	119,63	124,46	131,56	137,50	143,10
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	115,18	119,60	125,97	130,76	134,98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	120,02	128,95	136,42	144,61	149,04
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	120,03	125,98	134,47	140,59	145,69
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	120,61	121,52	119,39	120,38	121,87
1.f. Hotel dan Restoran	124,21	130,31	137,57	141,53	143,04
1.g. Lainnya	124,10	132,74	141,69	147,07	151,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	122,26	127,41	132,16	137,16	142,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	139,22	151,80	158,81	163,69	167,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	134,94	140,01	148,46	152,52	156,63
4.a. Bangunan	135,73	139,99	147,60	151,25	155,70
4.b. Non-Bangunan	134,23	140,02	149,31	153,83	157,57
5. Perubahan Inventori	142,54	251,80	192,76	195,67	199,71
6. Ekspor	165,65	165,69	156,43	150,89	153,09
7. Impor	165,42	169,83	176,09	181,51	183,81
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	114,62	122,15	127,82	132,19	137,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima**

Versi Tahun Dasar 2010

Kategori					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,02	4,48	4,59	4,02	3,06
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,02	4,03	5,71	4,51	4,07
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,05	3,84	5,32	3,81	3,23
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,77	7,44	5,79	6,00	3,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,73	4,96	6,74	4,54	3,63
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,75	0,75	(1,75)	0,83	1,24
1.f. Hotel dan Restoran	3,97	4,92	5,56	2,88	1,07
1.g. Lainnya	4,23	6,96	6,74	3,80	2,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,90	4,21	3,73	3,78	3,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	23,69	9,04	4,61	3,07	2,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	8,29	3,75	6,04	2,73	2,69
4.a. Bangunan	5,45	3,14	5,44	2,47	2,94
4.b. Non-Bangunan	11,02	4,32	6,63	3,03	2,43
5. Perubahan Inventori	18,58	76,65	(23,45)	1,51	2,07
6. Ekspor	52,96	0,02	(5,59)	(3,54)	1,46
7. Impor	25,53	2,67	3,69	3,08	1,26
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	6,22	6,56	4,64	3,42	3,64

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

VII *DAFTAR PUSTAKA*

<https://bimakab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA